

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal krusial yang perlu dan harus dicapai oleh setiap perusahaan untuk menghadapi persaingan dalam pengembangan perusahaan ialah kinerja keuangan. Kinerja keuangan berkaitan dengan keberhasilan manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan yang diwujudkan oleh prestasi kerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Menurut Srimindarti kinerja perusahaan memiliki hubungan dengan pengukuran dan penilaian. Pengukuran kinerja dalam periode akuntansi menggambarkan efisiensi serta kualifikasi dan efektivitas dalam perusahaan. Penilaian kinerja keuangan bertujuan menentukan efektivitas dan efisiensi dan secara periodik telah ditetapkan sebelumnya.² Kinerja keuangan juga disinyalir sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kebebasan dan fleksibilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi landasan dasar untuk mencerminkan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial yang cukup signifikan.

² Ceasilia Srimindarti, *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja*, (Semarang: STIEStikubank, 2006), hlm. 34

Maka dari itu apabila semakin tinggi tingkat kinerja keuangan perusahaan yang dihasilkan perusahaan, maka pengungkapan informasi tanggung jawab sosial akan cenderung semakin besar pula.³ *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan, mulai dari perusahaan kecil, sedang, maupun besar. Melalui penerapan CSR ini perusahaan tidak hanya mengejar profit atau laba setinggi-tingginya bagi perusahaan tanpa memperhatikan dampak dari kegiatan usahanya namun, perusahaan dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial, serta pengelolaan kualitas hidup masyarakat sehingga perusahaan memiliki peran lain yaitu mendorong perekonomian yang baik dengan faktor pertimbangan lingkungan hidup. Sejatinya CSR mencakup pelaksanaan yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, *stakeholders* baik internal maupun eksternal merupakan sasaran utama dari CSR, serta bidang kerja CSR meliputi manusia dan lingkungan.⁴

Mengutip artikel penelitian yang dilakukan oleh M. Ninja Jaka Putra di tahun 2019 terhadap aktivitas pengelolaan limbah B3 PT. Tjiwi Kimia Tbk pada 2013 menyimpulkan bahwa pabrik kertas PT. Tjiwi Kimia belum memenuhi standar pembuangan limbah yang telah ditetapkan sehingga berdampak buruk pada lingkungan hidup dan menimbulkan

³ Agung Prasetyo dan Wahyu Meiranto, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015*, Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 1.

⁴ Muhammadinah, *Analisis Kelengkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Indeks Global Reporting Initiative (GRI) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia*, I-Finance, Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 35

kerusakan sungai di sekitar pabrik beroperasi.⁵ Hasil penelitian ini diperkuat oleh artikel yang diunggah oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang menyoroti aktivitas tertutuppembuangan limbah cair B3 yang dilakukan PT. Tjiwi Kimia di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Brantas khususnya kanal Magetan.⁶ Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yaitu yang menurut PP no. 101 tahun 2014, didefinisikan sebagai sisa usaha atau kegiatan yang mengandung zat atau komponen yang secara langsung maupun tidak dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.⁷ Sedangkan menurut Restu Agusti yang mengutip dari Grey *et all* perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi bersifat akuntabel serta tata kelola perusahaan semakin bagus (*Good Corporate Governance* yang disingkat GCG) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.⁸

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

mendefinisikan *Corporate Governance* (CG) sebagai seperangkat

⁵ M. Ninja Jaka Putra, "Implementasi Peraturan Tentang Limbah Daerah No. 63 Tahun 2013 terhadap Lingkungan dan Masyarakat - UNAIR", dalam <https://repository.unair.ac.id>, diakses pada 10 Maret 2023

⁶ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, "Buang Limbah, Tjiwi Kimia Makin Tertutup – Dinas Kominfo Jawa Timur" dalam <https://kominfo.jatimprov.go.id/>, diakses 10 Maret 2023

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (Jakarta Badan Pengawas Keuangan, 2014), hlm. 2.

⁸ Restu Agusti, *Pengaruh Economic Performance dan Political Visibility Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*, Jurnal Ekonomi Universitas Riau Vol. 18 No. 3, 2010

peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.⁹ Penelitian ADB di tahun 2001 kepada 5 negara Asia mengungkapkan bahwa *corporate governance* yang buruk merupakan salah satu penyebab utama ketidakstabilan ekonomi yang membawa Indonesia mengalami krisis ekonomi 1997. Namun di Indonesia, isu *Good Corporate Governance* (GCG) muncul di tahun 1998 ketika Indonesia terdampak krisis moneter yang berkepanjangan. Perbaikan GCG perusahaan di Indonesia dimulai ketika penandatanganan perjanjian *Letter Of Intent* (LOI) dengan IMF yang berisi mengenai pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan struktur yang dapat meningkatkan kinerja dan perkembangan perusahaan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Tahun 1999 dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang bertugas merekomendasikan pedoman umum. Kemudian diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) berdasarkan KEP/49/M.EKON/11/2004 yang menghasilkan pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai dasar bagi perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) di tahun 2006 dan diubah menjadi PER-

⁹ Enni Savitri, *Corporate Governance*, (Riau: Universitas Riau, 2019), hlm. 10

01/MBU/2011, kemudian disempurnakan oleh PER-09/MBU/2012.¹⁰

Tujuan pemerintah Indonesia menyusun sejumlah peraturan yang melandasi penerapan GCG ialah untuk menyeragamkan pelaksanaan prinsip-prinsip dari GCG dan diharapkan tercipta perusahaan yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan sosial. Walaupun penerapan GCG di Indonesia sudah tertulis dalam peraturan resmi, penerapan GCG di Indonesia masih mengalami beberapa kendala. Hasil penelitian Sulistyanto dan Nugraheni yang dikutip oleh Edi Wibowo, menghasilkan bahwa pelaksanaan CG belum mampu mengurangi manipulasi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh sejumlah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).¹¹ Kendala penerapan GCG yang terjadi di dalam perusahaan meliputi komitmen pimpinan dan karyawan perusahaan yang masih rendah dan kurang, rendahnya tingkat pemahaman pimpinan dan karyawan terhadap prinsip GCG, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip GCG, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Sementara kendala eksternal pelaksanaan GCG berkaitan dengan perangkat hukum, aturan, dan penegakannya. Dalam jurnal Aries Susanty yang mengutip penelitian Fuady di tahun 2003 mengakui bahwa peraturan mengenai pasar modal di

¹⁰ Galih Rachmandy, *Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB, Vol. 1 No. 1, 2012

¹¹ Edi Wibowo, *Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10 No. 2, 2010, hlm. 134.

Indonesia masih sederhana untuk kondisi pasar yang kompleks dan peraturan yang dibuat masih sederhana serta belum ditegakkan sepenuhnya. Lemahnya penegakan hukum pada pasar modal dapat dilihat dari ringannya sanksi yang diberikan Bapepam kepada pihak yang melakukan pelanggaran dibandingkan dengan kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan. Bahkan Bapepam tidak pernah mengenakan sanksi apa pun kepada sejumlah emiten yang tidak membayar denda selama tiga tahun berturut-turut.¹² Oleh karena itu perlu adanya kerja sama yang baik antara perusahaan dan penegak hukum agar penerapan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kinerja perusahaan karena keefektifan komunikasi antar manajemen dan pemegang saham agar mempengaruhi investor pada pengambilan keputusan yang baik serta peningkatan pelayanan dari perusahaan. Siklus tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang berpengaruh kepada kinerja perusahaan yang lebih efektif dan efisien.¹³

Pemangku kepentingan di dalam perusahaan secara tidak langsung akan mendapatkan tuntutan dari berbagai pihak agar lebih responsif dalam menanggapi keadaan yang berubah secara cepat dan belum pernah diprediksi sebelumnya dengan itikad baik. Direksi dituntut untuk melakukan evaluasi dampak tata kelola saat menghadapi masalah atau krisis dalam perusahaan dan menerapkan perubahan sesuai keadaan.

¹² Aries Susanty, *Pemilihan Model Organisasi dan Terwujudnya Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*, J@TI UNDIP, Vol. 4 No. 1, 2009, hlm. 79.

¹³ Edi Wibowo, *Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10 No. 2, 2010, hlm. 129.

Sehingga prinsip *Corporate Governance* berubah secara permanen selama krisis berlangsung. Hal tersebut juga mempengaruhi dewan komisaris yang ikut serta secara tidak langsung dalam melakukan pengawasan usaha yang dilakukan oleh direksi untuk menghadapi krisis di dalam perusahaan seperti memberikan nasihat termasuk pengawasan terhadap rencana perusahaan dan juga RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan).¹⁴ Selain dewan komisaris dan dewan direksi, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPAP (Komite Profesi Akuntan Publik), Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.SC. bahwa komite audit menghadapi tantangan dalam melaksanakan pekerjaannya di tengah keterbatasan melakukan prosedur audit sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar audit. Dalam hal ini para auditor dituntut untuk tetap memperoleh bukti audit yang *sufficient* dan *appropriate* dalam rangka mendukung kualitas *output* atas jasa yang diberikan. Tantangan yang dengan cepat melanda di seluruh dunia selanjutnya direspon dan diantisipasi dengan cepat pula oleh pararegulator profesi dan asosiasi profesi melalui kebijakan dan penyesuaian standar akuntansiserta standar profesi.¹⁵

Corporate Governance dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki hubungan yang erat, keduanya membentuk fungsi obyektif untuk menghadapi kendala perusahaan termasuk di dalamnya yaitu kinerja

¹⁴ Lydia Anggun, *Pandemi Covid-19 Dan Implementasi Corporate Governance*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 90.

¹⁵ KPAP, "Tantangan Menjaga Kualitas Audit di Masa Pandemi Covid-19-KPAP" dalam <https://kpap.go.id/>, diakses 21 Desember 2022

keuangan. Bagi para investor atau para *stakeholders*, informasi kinerja keuangan perusahaan merupakan hal yang vital karena kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan dari kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai target perusahaan. Banyak penelitian yang menghasilkan hubungan positif setelah menganalisis hubungan CSR dan GCG terhadap kinerja keuangan. Salah satunya merupakan penelitian terbaru oleh Tati Rosyati dan Fina Fitriyana berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Perusahaan” terhadap 11 perusahaan terdaftar di BEI tahun 2017-2020 yang menghasilkan bahwa secara parsial Dewan Komisaris dan Proporsi komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Economic Value Added*. Sedangkan Dewan Direksi, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *Economic Value Added* serta secara simultan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Economic Value Added*.¹⁶

Penelitian ini mengambil subjek penelitian yaitu perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yakni perusahaan dengan produksi limbah B3 terbesar dan masih banyaknya kasus pencemaran akibat dari limbah B3 yang dibuang tanpa mengikuti alur pengelolaan. Kasus tersebut merupakan gambaran bahwa CSR masih belum berjalan

¹⁶ Tati Rosyati dan Fina Fitriyana, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan*, Jurnal Riset Akuntansi Politala, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 85.

dengan baik serta bagaimana penerapan prinsip CG. Oleh karena itu peneliti mengambil penelitian mengenai bagaimana CSR dan CG dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan subjek penelitian yang berbeda yaitu perusahaan sektor industri dasar dan kimia terdaftar di BEI. Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul “**Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur?
5. Apakah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan.

5. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bidang ilmu akuntansi terkait pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan industri asar dan kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020.

E. Batasan Masalah

1. Penelitian ini berfokus pada akuntansi keuangan khususnya mengenai *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan kinerja keuangan perusahaan.
2. Objek dari penelitian ini yaitu perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020.
3. Data yang dipakai merupakan data sekunder yang diperoleh dari *website* BEI dan *website* masing-masing perusahaan terkait.

4. Objek yang diteliti untuk *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit.

F. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci sehingga dapat diketahui pengertian serta batasan dalam penjelasan.

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan organ perusahaan yaitu direksi, dewan komisaris, dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memberikan nilai tambahan kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya serta berlandaskan peraturan, perundangan, dan norma yang berlaku.¹⁷

2. Ukuran Dewan Direksi

Dalam teori agensi terdapat kontrak yang berisi tentang pekerjaan manajer dalam memberikan tingkat pengembalian yang maksimal bagi para pemilik modal. Manajemen yang berada di top level manajemen memiliki peranan penting karena bertanggungjawab mewujudkan tujuan perusahaan. Pada bagian top level manajemen salah satunya yaitu dewan direksi yang merupakan mekanisme serta

¹⁷ Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), hlm.8.

menjamin terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. perusahaan dengan jumlah dewan kecil akan dipercaya lebih dapat meningkatkan nilai perusahaan karena perusahaan dengan ukuran dewan yang besar akan lebih susah untuk melakukan pemantauan dan kurang efektif dalam melakukan komunikasi.¹⁸

3. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Monks dan Minow dalam Lukviarman, dewan komisaris perusahaan merupakan elemen utama dalam *Corporate Governance* dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah dari seluruh komisaris yang terdapat pada organisasi perusahaan baik itu komisaris yang berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan (komisaris independen) yang dibantu komite audit untuk mengawasi kegiatan perusahaan.¹⁹

4. Ukuran Komite Audit

Menurut Zainuddin yang dikutip oleh Rega dan Vanica Serlye Ukuran komite audit merupakan seluruh anggota komite audit. Semakin banyak jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya minimal tiga orang, satu diantaranya adalah berasal dari luar perusahaan. Apabila komite audit yang dimiliki perusahaan cukup

¹⁸ Abdur Rouf, *The Relationship between Corporate Governance and Value of the Firm in Developing Countries: Evidence from Bangladesh*, *The International Journal of Applied Economics and Finance*, Vol. 5 No. 3, 2011.

¹⁹ Lukviarman, *Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2016), hlm. 162.

banyak maka akan membantu dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan aktivitas perusahaan.²⁰

5. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berperilaku secara etis, meminimalisir dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif mencakup ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.²¹

6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan bermanfaat bagi berbagai pihak seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi dari suatu perusahaan, bila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.²² Kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Unsur yang

²⁰ Rega Dwi Putra dan Vanica Serly, *Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Finansial Distress*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2 No.3, 2020.

²¹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 8.

²² Martono dan Harjito, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm 52

berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban tergantung sebagian konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.²³

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan lebih sistematis apabila disusun sesuai dengan kaidah yang baik, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

Bab II Landasan teori, terdiri dari teori-teori yang membahas variabel/sub variabel. Sehingga dalam pembahasannya memuat (1) teori *stakeholders*; (2) teori legitimasi; (3) teori keagenan; (4) *good corporate governance* dengan tiga sub bab variabel yaitu definisi *corporate governance* serta manfaat, prinsip, dan tujuan penerapan *corporate governance* (5) organ perusahaan dengan sub variabel pembahasan yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit; (6) *corporate social responsibility* dengan tiga sub

²³ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 46

variabel yaitu pengertian *corporate social responsibility*, konsep *corporate social responsibility*, dan pengungkapan *corporate social responsibility*; dan (4) kinerja keuangan dengan sub bab antara lain definisi laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, serta ukuran kinerja keuangan. Pada bab ini juga akan menjelaskan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode penelitian, berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data

Bab IV Hasil penelitian, terdiri dari hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengajuan hipotesis serta temuan penelitian.

Bab V Pembahasan hasil penelitian

Bab VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan, dan seterusnya.